

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2019). Implementasi Sistem Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 231-245.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2017). *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Semarang: BPS.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. 't. (2008). Public Accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025, 369. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Jawa-Tengah.pdf>.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 12(1), 67-80.
- Fitriani, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 77-90.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2010). So What Difference Does It Make? Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. *Institute of Development Studies*.
- Grindle, M. S. (1997). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 10(4), 525-548.
- Halim, A. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 123-135.
- Halim, A. (2022). Good Governance dan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 201-215.
- Hidayat, S. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-123.
- Inspektorat Kabupaten Semarang. (2023). *Laporan Hasil Audit Pengelolaan Dana Desa*. Semarang: Inspektorat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kemendagri.

- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kemendes.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. *Finance & Development*, 35(1), 3-6.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Kajian Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Tahunan KPK 2021. Jakarta: KPK.
- Kurniawan, T. (2020). Capacity Building Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55-68.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Metro TV. (2025). Ratusan Kepala Desa Korupsi Dana Desa Sejak 2015, Masyarakat Perlu Lebih Mengawasi. Diakses pada 29 Mei 2025, dari Ratusan Kepala Desa Korupsi Dana Desa Sejak 2015, Masyarakat Perlu Lebih Mengawasi
- Moreno Ocampo, L. (2004). Corruption: A Global Perspective. In R. A. Smith (Ed.), *Corruption: A Global Perspective*. New York: Routledge.
- Nurfahrudin, Z., & Gunanto, E. Y. A. (2021). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 10-19.
- N. I. Taufik, A. Pradesa, dan I. Agustina, "Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung", doi: 10.32812/jibeka.v16i1.353.

- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028-1062.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rani, Febrina Hertika, et al. "Mitigasi Resiko dalam Penggunaan Dana Desa." *Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa* 1.2 (2023): 87-98.
- Rasyid, M. R. (2016). *Pemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ratnasari, D. (2020). Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123-140.
- Riyadi, A. (2020). Analisis Risiko Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 89-102.
- Sari, D. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1-15.
- Sari, N. P., & Wulandari, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 123-132.
- Setiawan, H. (2019). Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 89-101.
- Suharto, E. (2010). *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, S. (2020). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 123-135.
- Sukardi, S. (2019). *Pengelolaan Dana Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 1-18.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutaryo & Suhardjanto, D. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 45-60.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

World Bank. (2004). World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People. Oxford University Press.

World Bank. (2018). Indonesia's Village Law: Enabling Participatory Planning and Budgeting. Jakarta: World Bank.

Yuwono, T. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik. Semarang: Undip Press.

Yusri dan Chairina, Buku Monograf Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. PT.Inovasi Pratama Internasional.